

IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN PERTANIAN SEBAGAI *SUPPORTING SYSTEM* DALAM AGRIBISNIS PERTANIAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Emah Hilma Meilani¹⁾, Endang Tri Astutiningsih²⁾, Reny Sukmawani³⁾, Amalia Nur Milla⁴⁾

^{1,2,3,4}*Fakultas Pertanian - Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Jl. R. Syamsudin SH No. 50 Sukabumi
emahilma027@ummi.ac.id*

ABSTRACT

Identification Of Agricultural Institutions As Supporting Systems In Agricultural Agribusiness In Sukabumi District. Sukabumi area has potential agricultural commodities, which each of subsector agricultural need to analyzed both of food, horticulture, plantations, fisheries and livestock. Agricultural institution is part of the agribusiness system that needed as a supporting system in agribusiness. This research aims to identify institution as a role of supporting in upstream, on farm and downstream of agribusiness sub system. The method used is literature study that using secondary data. The result showed that the types of institution in agricultural agribusiness consisted of educational institutions, social institutions, economic institutions and information service institutions. The institutional potential can be able to support the increase of agricultural productivity, especially superior commodities in Sukabumi Regency.

Keywords : Agricultural institutions, supporting system, agribusiness

ABSTRAK

Kabupaten Sukabumi memiliki potensi komoditas unggulan sector pertanian yang sangat beragam baik pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Masing masing subsektor unggulan perlu dilakukan analisis, termasuk didalamnya kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam system agribisnis karena kelembagaan pasti diperlukan sebagai *supporting system* dalam setiap subsistem agribisnis. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kelembagaan yang berperan menjadi supporting system dalam agribisnis pertanian baik di hulu, hilir maupun *on farm*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelembagaan yang terdapat dalam agribisnis pertanian terdiri dari kelembagaan pendidikan, kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan layanan informasi. Potensi kelembagaan tersebut diharapkan mampu mendukung pada peningkatan produktivitas komoditas pertanian terutama komoditas unggulan di Kabupaten Sukabumi

Kata Kunci : kelembagaan pertanian, supporting system, agribisnis

PENDAHULUAN

Kelembagaan pertanian merupakan salah satu bagian dari subsistem penunjang dalam system agribisnis. Komoditas pertanian yang dilihat sebagai sebuah system agribisnis memang tidak dapat dilihat secara sederhana. Peran serta kelembagaan pertanian di Kabupaten Sukabumi dalam mendorong berjalannya sistem agribisnis sangat diperlukan. Namun demikian, peran serta kelembagaan masih dianggap belum maksimal terutama terkait dengan system usahatani yang melibatkan banyak sekali stakeholder dalam pelaksanaannya. Kelembagaan agribisnis lebih banyak mengartikan sebagai kumpulan orang orang untuk mencapai tujuan bersama. Sebenarnya kelembagaan agribisnis dapat pula diartikan sebagai hubungan antar pelaku ekonomi untuk saling berinteraksi mencari insentif ekonomi. Ronald Coase dan Elinor Ostrom menyatakan bahwa kelembagaan sebagai system nilai suatu masyarakat bisnis dan masyarakat sosial. Keduanya merupakan penerima nobel ekonomi kelembagaan dimana kelembagaan lebih dilihat dalam sudut pandang ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Kelembagaan pada usaha pertanian sangat berbeda dengan kelembagaan pada usaha manufaktur. Hal ini sangat erat terkait dengan

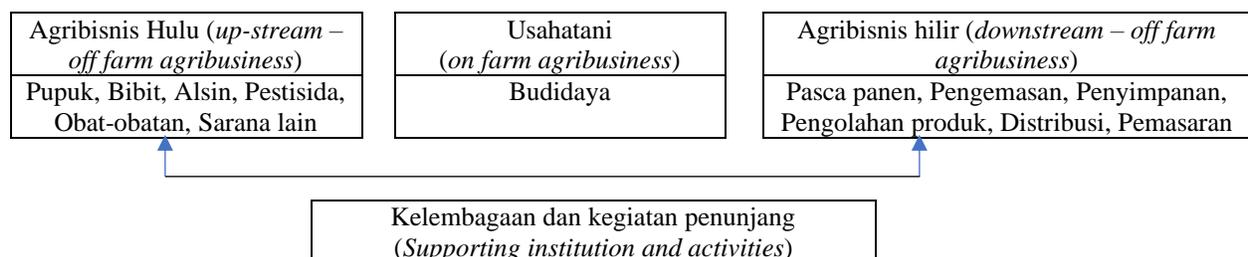
karakteristik usahatani yang sangat berbeda antara sektor pertanian dan sektor industri (Rondhi, M dan Khasan, AF, 2021). Karakter usaha bidang pertanian yang dicirikan dengan ketergantungan pada alam, masa tunggu yang lama dalam berproduksi, modal yang dimiliki terbatas, resiko yang cukup tinggi dan skala usahatani relatif kecil menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam interaksi kelembagaannya. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan cenderung khas dengan risiko yang akan dihadapi oleh pelaku usaha, atau juga munculnya tindakan yang mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi. Dalam menjalankan usahatani petani akan bekerja dengan mitra yang dianggap dapat membantu usahatannya. Penyedia sarana produksi, penyedia tenaga kerja, dan pembeli hasil produksi adalah mitra mitra yang diperlukan petani dalam keberhasilan usahatannya.

Kelembagaan merupakan keseluruhan pola pola ideal, organisasi dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu memiliki tujuan memenuhi kebutuhan petani yang beragam sehingga keberadaan lembaga terasa fungsinya. Kelembagaan juga meliputi pengertian yang luas selain mencakup pengertian organisasi petani, juga “aturan main” (role of game) atau aturan perilaku yang menentukan pola pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari suatu lembaga (Anantanyu, 2011)

Konsep agribisnis di Indonesia baru dikenal sekitar tahun 70 an. Agribisnis memunculkan pemahaman aktivitas usahatani baik *on farm* maupun *off farm* dapat diartikan dalam pertanian yang lebih luas. Bungaran Saragih (2011) menjelaskan bahwa sistem agribisnis terbagi 4 subsistem yaitu:

1. Subsistem Agribisnis hulu (*Up-stream Agribusiness*) yaitu industri yang menghasilkan barang-barang modal untuk pertanian yaitu industri perbenihan, pupuk, pestisida, pakan, obat/vaksin hewan, serta alat dan mesin pertanian. Pada sub sistem hulu industri yang diperlukan oleh petani lebih banyak dipenuhi oleh pihak swasta.
2. Sub sistem Agribisnis Usahatani/ pertanian (*On-Farm Agribusiness*) yaitu kegiatan usahatani/ternak/ikan/tumbuhan yang menggunakan barang-barang modal dalam proses produksi tanaman/hewan untuk menghasilkan komoditas dan jasa lingkungan. Pada sub system ini petani berada pada posisi penyedia bahan baku atau produk ahir dari suatu budidaya usahatani.
3. Subsistem Agribisnis hilir (*down-Stream Agribusines*) yaitu industri yang mengolah komoditas pertanian menjadi produk jadi (*finish product*) beserta pemasarannya. Sub system ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih luas dari pertanian disbanding hanya mengenal budidaya.
4. Subsistem penyedia jasa untuk Agribisnis (*services for agribusiness*) yaitu kegiatan industri/lembaga yang menghasilkan/menyediakan jasa bagi agribisnis. Termasuk industri perbankan, transportasi, logistik dan pelabuan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kebijakan pemerintah (tataruang /pertanahan, fiskal, moneter, infrastruktur dan lain-lain). Pada sub system penyedia jasa akan semakin luas spektrum agribisnis sebagai sebuah system dalam mengembangkan komoditas pertanian.

Selain Bungaran saragih pernyataan yang terkait dengan konsep agribisnis juga dikemukakan oleh Sutrisn (2009) dimana agribisnis menurut pandangan Sutrisno adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang yang berhubungan dengan pertanian. Berdasarkan beberapa definisi tentang agribisnis maka agribisnis merupakan pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang atau jasa yang diminta pasar (Sukmawani dkk, 2016). Secara lebih jelas sistem Agribisnis dan pilar yang membentuknya dapat dilihat pada Gambar 1.



Bank, R & D, Asuransi, Pendidikan, Penyuluhan,
Latihan, Konsultasi, Kebijakan Pemerintah, dll

Sumber : Sukmawani, 2016

Gambar 1. Sistem Agribisnis

Kelembagaan agribisnis dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam proses produksi dimana suatu komoditas diproduksi hingga aturan main dalam mendistribusikan komoditas ke tangan lembaga selanjutnya. Definisi tersebut secara luas membahas aturan main baik di level pelaku utama bisnis atau pelaku penunjang. (Rondhi, M dan Hasan, AF, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait yang diolah dan disajikan dalam bentuk tabel serta persentase. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran kelembagaan yang mendorong agribisnis pertanian di Kabupaten Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan pendidikan

Kelembagaan pertanian di Kabupaten Sukabumi secara garis besar hidup dalam masyarakat pertanian terdiri dari kelembagaan pendidikan, kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan layanan informasi. Salah satu kelembagaan yang berperan penting adalah kelembagaan petani. Permentan no 67 tahun 2016 menyebutkan bahwa kelembagaan petani memang tumbuh dari, oleh dan untuk petani dimana peran kelembagaan petani tersebut harus memperjuangkan kepentingan petani diantaranya adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional. Di tingkat Kabupaten kelembagaan ini ditambah yang beraasal dari pihak eksternal petani misalnya penyuluh pertanian, lembaga pendidikan dan pelatihan dan juga lembaga penyedia informasi pertanian.

Kelompok tani memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dimana kelompok tani dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari para anggotanya. Kelas kelompok tani di Kabupaten Sukabumi di dominasi oleh kelas pemula. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesadaran para petani dalam meningkatkan kualitas dirinya masih harus didorong oleh pihak eksternal sehingga perlu strategi dan tahapan yang panjang untuk menyadari pentingnya pendidikan. Kondisi kelompok tani di kabupaten sukabumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kelas Kelompok tani di Kabupaten Sukabumi

No	Kelas kelompok tani	Jumlah	Persentase (%)
1	Pemula	1802	46.6
2	Lanjut	1717	44.4
3	Madya	324	8.4
4	Utama	25	0.6
	Jumlah	3868	

Sumber : Dinas Pertanian, 2023

Tabel 1 memberikan gambaran bahwa kelompok tani di kabupaten sukabumi masih harus ditingkatkan kualitas anggota anggota di dalamnya. Hal tersebut terlihat dari jumlah kelompok tani yang paling banyak berada pada kelas pemula, diikuti dengan kelas lanjut. Kelas pemula merupakan kelas kelompok tani paling rendah dimana dalam penilaian kelompok tani berada pada rentang 0 – 250. Dari 5 indikator penilaian maka kelas pemula hanya mampu menjalankan 1 atau 2 indikator dalam penilaian kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa petani di kabupaten sukabumi masih berada dalam keadaan

lemah atau tidak berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan salah satunya merupakan akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif (Syahza, 2011).

Pembangunan sektor pertanian yang berkembang menjadi bentuk agribisnis merupakan salah satu upaya untuk dapat menjadikan pertanian tetap sebagai sector ekonomi yang utama dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani. Pengembangan kelompok tani sebagai kelembagaan pendidikan mengacu pada peran kelompok tani sendiri sebagai wahana produksi dimana untuk meningkatkan produksi para anggotanya dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap apriori menjadi terbuka dan menambah keterampilan dalam proses produksi komoditas pertanian.

Kelembagaan sosial

Kelembagaan pertanian dapat berfungsi pula sebagai kelembagaan sosial. Dalam usahatani banyak peran yang diperlukan untuk mendukung berjalannya proses usahatani di masyarakat pertanian. Agribisnis sebagai salah satu proses pengembangan pertanian perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Oleh karena itu kelompok tani selain sebagai wahana produksi dan pendidikan juga berfungsi sebagai wahana kerjasama. Kelembagaan yang berperan dalam kerjasama dikenal dengan mitra dan sistemnya disebut sebagai kemitraan. Kelembagaan pertanian mampu menjadi kelembagaan sosial apabila pihak-pihak eksternal memberikan dorongan terhadap proses produksi komoditas yang tentunya dibutuhkan oleh pasar. Sebagai gambaran di kabupaten Sukabumi banyak kelompok tani yang mamou bekerjasama baik dari sisi off farm hulu, on farm maupun of farm hilir. Banyak faktor yang dapat mendukung dalam kelembagaan agribisnis diantaranya (1) jumlah penduduk yang bertambah akan mberimbas pada kebutuhan pangan yang semakin tinggi sehingga dapat menjadi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan pelaku usahatani, (2) pendapatan masyarakat Indonesia saat ini memperoleh kenaikan yang cukup besar sehingga kebutuhan pangan tidak hanya sekedar meningkat, namun juga disertai dengan pemilihan pangan yang berkualitas dan beragam sehingga mendorong tumbuhnya industry olahan pangan, (3) perkembangan yang baik dalam kebutuhan pangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan petani meningkat dan ketimpangan masyarakat dapat diminimalisir.

Kelembagaan ekonomi

Kelembagaan pertanian yang ada di masyarakat saat ini memang didominasi peran dan fungsinya oleh kelompok tani di sisi petani dan penyuluhan di sisi pemerintah. Namun demikian pihak swasta juga tidak kalah perannya dalam kelembagaan ekonomi. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi maupun individu yang menyediakan modal untuk usahatani dapat berfungsi sebagai kelembagaan ekonomi. Berdasarkan data Sukabumi dalam angka terdapat 2223 koperasi di kabupaten Sukabumi sebagai penggerak perekonomian di masyarakat. Jumlah ini belum terdata koperasi yang bergerak di bidang agribisnis sehingga analisis tidak dapat dilakukan terhadap lembaga ekonomi tersebut. Dengan munculnya program PUAP dari pemerintah yang menjadikan gapoktan sebagai lembaga keuangan ekonomi mikro maka dapat dipastikan jumlah lembaga keuangan yang bergerak untuk kesejahteraan petani sudah bertambah. Hanya saja, efektifitas dan kinerjanya memang belum ada hasil yang akurat untuk menyatakan keberhasilan lembaga ekonomi tersebut.

Kelembagaan layanan informasi

Kelembagaan pertanian berikutnya yang teridentifikasi adalah kelembagaan layanan informasi. Lembaga yang berperan dalam menyebarkan informasi tersebut adalah BPP (balai penyuluhan pertanian). BPP di Kabupaten Sukabumi terdapat di setiap kecamatan sehingga jumlah keseluruhan BPP adalah 47 buah. Peran dan Fungsi BPP seperti yang kita ketahui adalah memberikan layanan terhadap petani yang membutuhkannya. BPP sebagai pusat pembelajaran memberikan pelatihan dan pendidikan bagi anggota kelompok tani yang memerlukan. Pusat informasi dimana teknologi teknologi terbaru yang bermanfaat bagi petani senantiasa didiseminasikan kepada petani.

Semua peran kelembagaan petani yang diuraikan teridentifikasi di Kabupaten Sukabumi dilandasi adanya kebutuhan pembangunan sumberdaya manusia yang Tangguh dalam menguatkan sumberdaya alam yang dimiliki kabupaten Sukabumi. Dengan pemikiran bahwa sumberdaya manusia harus kuat, infrastruktur harus lengkap, juga ketersediaan modal bagi petani maka kelembagaan pertanian sebagai supporting system pada sistem agribisnis perlu diperkuat. Kelembagaan pertanian perlu didukung dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai kemajuan pertanian di kabupaten Sukabumi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kelembagaan juga menjadi bagian pemecahan masalah dibidang pertanian.

KESIMPULAN

Kelembagaan pertanian yang teridentifikasi di kabupaten Sukabumi terdiri dari kelembagaan pendidikan, kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan layanan informasi. Seluruh kelembagaan tersebut terwakili dalam lembaga kelompok tani dan gapoktan, lembaga koperasi atau keuangan lainnya, dan BPP dalam melayani kebutuhan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. Kelembagaan Petani: Peran dan Startegi Pengembangan Kapasitasnya. SEPA : Vol 7 No 2 Pebruari 2011: 102-109 ISSN : 1829-9946
- Hermawan, Moch Farhan, et al. "KONVERGENSI AKTOR KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN SUMEDANG." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9.1 (2023): 727-740.
- Rondhi, M dan Ahmad Fatikhul Khasan. Editor : Bustanul Arifin. 2021. UPT Penerbitan Universitas Jember. Jember.
- Saragih, Bungaran. 2001. Kumpulan Pemikiran Agribisnis Paradigma baru Pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Pustaka Wirausaha muda. PT. Loji Grafika Griya Sarana.
- Sukmawani, Reny dkk. 2016. Potensi dan Pengembangan Terubuk di Kabupaten Sukabumi. CV Nurani. Bandung.
- Sutrisno, 2009. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Berbasis agribisnis. Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
- Yudha, Eka Purna, et al. "Rural development policy and strategy in the rural autonomy era. Case study of Pandeglang Regency-Indonesia." *Human Geographies* 14.1 (2020): 125-147.